



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun Berjalan.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	14
BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat.....	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat.....	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat.....	21
BAB V Penutup.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja..

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

(a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja-PD pada Triwulan II yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang

Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

- h. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Padang Panjang;
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022;
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2024 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat table rencana kerja dan pendanaan pada Inspektorat daerah Kota Padang Panjang untuk Anggaran Perubahan Tahun 2024.

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun berjalan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Insepktorat Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Kota Padang Panjang Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1)yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	k	Rp	I		II				III	IV		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=6+12		14=13/5x100%	15	
				K	Rp	K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan		Rp 1.340.000.000				Rp 707.383.200		Rp 166.170.000		Rp 92.893.500				Rp 259.063.500		Rp 259.063.500		19,33%	ITDA
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan		Rp 1.185.000.000				Rp 593.201.000		Rp 166.170.000		Rp 81.293.500				Rp 247.463.500		Rp 247.463.500		20,88%	ITDA
		Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	18 Laporan	Rp 170.000.000			6 Laporan	Rp 39.600.000		Rp 8.605.000		Rp 16.545.000				Rp 25.150.000		Rp 25.150.000		14,79%	ITDA
		Pengawasan Keuangan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	375 Laporan	Rp 675.000.000			120 Laporan	Rp 405.600.000		Rp 137.725.000		Rp 27.710.000				Rp 165.435.000		Rp 165.435.000		24,51%	ITDA
		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan	6 Laporan	Rp 80.000.000			2 Laporan	Rp 23.800.000		Rp -		Rp 17.690.000				Rp 17.690.000		Rp 17.690.000		-	ITDA
		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	3 Laporan	Rp 75.000.000			1 Laporan	Rp 43.179.000		Rp 15.365.000		Rp -				Rp 15.365.000		Rp 15.365.000		20,49%	ITDA
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Joint Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang Dilaksanakan	4 Laporan	Rp 40.000.000			-	Rp -		Rp -		Rp -				Rp -		Rp -		-	ITDA
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APH	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APH	13 Laporan	Rp 145.000.000			3 Laporan	Rp 81.022.000		Rp 4.475.000		Rp 19.348.500				Rp 23.823.500		Rp 23.823.500		16,43%	ITDA
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Tuntas Dilaksanakan		Rp 155.000.000				Rp 114.182.200		Rp -		Rp 11.600.000				Rp 11.600.000		Rp 11.600.000		7,48%	ITDA
		Penanganan Penyediaan Kebutuhan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Negara / Daerah yang	3 Laporan	Rp 7.500.000			1 Laporan	Rp 49.982.200		Rp -		Rp -				Rp -		Rp -		0,00%	ITDA
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan	18 Laporan	Rp 147.500.000			6 Laporan	Rp 64.200.000		Rp -		Rp 11.600.000				Rp 11.600.000		Rp 11.600.000		7,86%	ITDA
	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP		Rp 630.280.000				Rp 363.533.000		Rp 8.072.500		Rp 16.443.275				Rp 24.515.775		Rp 24.515.775		3,89%	ITDA
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas Dilaksanakan	-	Rp 40.000.000			-	Rp -		Rp -		Rp -				Rp -		Rp -		-	ITDA
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	Rp 40.000.000			-	Rp -		Rp -		Rp -				Rp -		Rp -		-	ITDA
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas Dilaksanakan	-	Rp 590.280.000			-	Rp 363.533.000		Rp 8.072.500		Rp 16.443.275				Rp 24.515.775		Rp 24.515.775		4,15%	ITDA
		Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintah Daerah	69 Perangkat Daerah	Rp 172.280.000			23 Perangkat Daerah	Rp 123.755.000		Rp 5.170.000		Rp 13.340.000				Rp 18.510.000		Rp 18.510.000		10,74%	ITDA
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	69 Perangkat Daerah	Rp 35.000.000			23 Perangkat Daerah	Rp 10.700.000		Rp -		Rp -				Rp -		Rp -		0,00%	ITDA
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	6 Kegiatan	Rp 208.000.000			3 Kegiatan	Rp 109.207.600		Rp 2.902.500		Rp 3.103.275				Rp 6.005.775		Rp 6.005.775		2,89%	ITDA

		Pendampingan, Asistensi dan Vertifikasi - Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang ditilikasi	69 Perangkat Daerah	Rp 175.000.000			25 Perangkat Daerah	Rp 119.870.400		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		0,00%	ITDA
	Meningkatnya Kapabilitas APDP	Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang dipecahkan pada Inspektorat Daerah		Rp 14.436.828.880				Rp 5.935.857.233		Rp 1.583.435.299		Rp 1.709.980.120		Rp 3.293.415.419		Rp 3.293.415.419		22,81%	ITDA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 12.450.000.000				Rp 4.650.716.833		Rp 1.197.385.990		Rp 1.601.497.765		Rp 2.798.883.755		Rp 2.798.883.755		22,48%	ITDA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1442/ Orang	Rp 12.450.000.000			30 Orang/ Bulan	Rp 4.650.716.833		Rp 1.197.385.990		Rp 1.601.497.765		Rp 2.798.883.755		Rp 2.798.883.755		22,48%	ITDA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 148.000.000				Rp 279.589.800		Rp 76.660.000		Rp -		Rp 76.660.000		Rp 76.660.000		51,80%	ITDA
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta atribut	40 Paket	Rp 40.000.000			40 Paket	Rp 16.000.000		Rp 15.500.000		Rp -		Rp 15.500.000		Rp 15.500.000		38,75%	ITDA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Pemeriksa yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	1 Orang	Rp 10.000.000			-	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		-	ITDA
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Pemeriksa yang terlatih dan studi Komparatif	112 Orang	Rp 98.000.000			40 Orang	Rp 263.589.800		Rp 61.160.000		Rp -		Rp 61.160.000		Rp 61.160.000		62,41%	ITDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 681.828.880				Rp 295.312.900		Rp 64.153.055		Rp 38.543.410		Rp 102.696.465		Rp 102.696.465		15,06%	ITDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 9.300.000			1 Paket	Rp 2.553.700		Rp 1.118.000				Rp 1.118.000		Rp 1.118.000		12,02%	ITDA
		Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 30.000.000			1 Paket	Rp 9.094.000		Rp -				Rp -		Rp -		0,00%	ITDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 87.528.880			1 Paket	Rp 47.784.800		Rp 17.256.500		Rp 6.227.400		Rp 23.483.900		Rp 23.483.900		26,83%	ITDA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	Rp 75.000.000			2 Paket	Rp 13.656.400		Rp 5.682.250		Rp 500.000		Rp 6.182.250		Rp 6.182.250		8,24%	ITDA
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	Rp 30.000.000			-	Rp -		Rp -				Rp -		Rp -		-	ITDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430 Laporan	Rp 450.000.000			150 Laporan	Rp 222.224.000		Rp 40.096.305		Rp 31.816.010		Rp 71.912.315		Rp 71.912.315		15,98%	ITDA
		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 80.000.000				Rp 91.790.500		Rp 87.250.000		Rp -		Rp 87.250.000		Rp 87.250.000		109,06%	ITDA
		Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang	6 Unit	Rp 80.000.000			2 Unit	Rp 91.790.500		Rp 87.250.000		Rp -		Rp 87.250.000		Rp 87.250.000		109,06%	ITDA
		Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		Rp 657.000.000				Rp 248.117.200		Rp 47.104.884		Rp 44.694.795		Rp 91.799.679		Rp 91.799.679		13,97%	ITDA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat	36 Laporan	Rp 6.000.000			1 Laporan	Rp 520.000		Rp 250.000				Rp 250.000		Rp 250.000		4,17%	ITDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	Rp 81.000.000			1 Laporan	Rp 17.808.400		Rp 3.046.700		Rp 3.262.519		Rp 6.309.219		Rp 6.309.219		7,79%	ITDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Rp 570.000.000			1 Laporan	Rp 229.788.800		Rp 43.808.184		Rp 41.432.276		Rp 85.240.460		Rp 85.240.460		14,95%	ITDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik		Rp 420.000.000				Rp 370.330.000		Rp 110.881.370		Rp 25.244.150		Rp 136.125.520		Rp 136.125.520		32,41%	ITDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	24 Unit	Rp 265.000.000			9 Unit	Rp 221.750.000		Rp 106.728.370		Rp 19.554.650		Rp 126.283.020		Rp 126.283.020		47,65%	ITDA

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Rp 90.000.000			1 Unit	Rp 32.020.000		Rp 4.153.000		Rp 3.554.500				Rp 7.707.500		Rp 7.707.500		8,56%	ITDA
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Rp 5.000.000			5 Unit	Rp 800.000		Rp -						Rp -		Rp -		0,00%	ITDA
		Pemeliharaan/Perlatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin yang	30 Unit	Rp 30.000.000			20 Unit	Rp 16.560.000		Rp -		Rp 2.135.000				Rp 2.135.000		Rp 2.135.000		7,12%	ITDA
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	3 Unit	Rp 30.000.000			1 Unit	Rp 99.200.000		Rp -						Rp -		Rp -		0,00%	ITDA
Rata-rata capaian kinerja (%)									Rp 1.757.627.799		Rp 1.819.316.895						Rp 3.576.994.694		Rp 3.576.994.694			
Predikat kinerja																						

2.2. Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Tahun Anggaran 2024 realisasi program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum bidang Inspektorat tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp. 4.650.716.833,-

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan seluruh ASN di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **63%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.798.883.755,- (60,18%)**. Dari kegiatan ini telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 11 bulan termasuk gaji ke 13 dan ke 14.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

i. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 16.000.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pakaian dinas beserta atribut pada seluruh pegawai di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari kegiatan ini telah mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 15.500.000,- (96,88%)**.

ii. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 263.589.800,

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan APIP dengan dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi Fisik dari kegiatan ini telah mencapai **50%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 61.160.000,- (23,20%)**.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan;

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sebesar Rp. 2.553.700,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **70%** sedangkan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 1.118.000,-(43,78%)**. Dari

Kegiatan ini dihasilkan perlengkapan penerangan kantor seperti bola lampu, kabel-kabel listrik dan peralatan listrik lainnya.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 9.094.000

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah **50%**, sedangkan realisasi keuangan masih sebesar **Rp. 0,- (0%)**

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sebesar Rp. 47.784.800,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya alat-alat kebersihan dan alat tulis kantor. Realisasi fisik kegiatan ini adalah jumlah alat kebersihan yang tersedia mencapai **70%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 23.483.900,- (49,15%)**. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan alat kebersihan kantor dan alat tulis kantor sehingga kebersihan kantor dapat terjaga dan terpelihara.

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sebesar Rp. 13.656.400,-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **75%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.182.250,-(45,27%)**. Dalam kegiatan ini dihasilkan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, seperti cetak map, kulit Laporan Hasil Pemeriksaan, dan fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 222.224.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam kota dan di luar kota dan tersedianya anggaran makan minum rapat untuk menunjang pelaksanaan rapat. Realisasi fisik dari pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar **57%**. Sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 71.912.315,-(32,36%)**. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihasilkan keikutsertaan pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah dan juga dapat dihasilkan penyelenggaraan rapat-rapat internal kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Kegiatan;

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Sebesar Rp. 520.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **50%** sedangkan realisasi Keuangan **Rp. 250.000,- (48,08%)**. Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal surat menyurat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp. 17.808.400,-

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **55%** sedangkan realisasi keuangan **Rp.6.309.219,-(35,43%)** .Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang urusan kantor.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sebesar Rp. 229.788.800,-

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi fisik dari subkegiatan ini adalah sebesar **55%** sedangkan realisasi keuangan **Rp.85.240.460,-(37,10%)**. Kegiatan ini untuk membayar jasa pegawai honorer, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan tenaga sopir yang menunjang kinerja ASN di lingkungan Inspektorat.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 91.790.500

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar, Rp. 91.790.500

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 87.250.000,-(95,05%)**. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 370.330.000

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 221.750.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **70%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar

Rp. 126.283.020,-(56,95%). Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan sebesar Rp. 32.020.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **45%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 7.707.500,-(24,07%).** Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

3. Pemeliharaan Mebel 800.000

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan mebel sebagai bagian dari kelancaran kegiatan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini **0%**, sedangkan realisasi keuangan masih **Rp. 0,- (0%)**

4. Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.16.560.000,-

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **50%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.135.000,-(12,89%).**

5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.200.000

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor berupa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **25%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%).**

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 39.600.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** dengan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 25.150.000,-(63,51%).** Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan Pengawasan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024.

2. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar Rp.405.600.000,-

Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai **70%** dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 165.435.000,-(40,79%)**. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengawasan internal berupa audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pendampingan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024.

3. Reviu Laporan Kinerja Sebesar Rp. 23.800.-000,-

Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah disusun sebelum disampaikan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi fisik dari sub kegiatan ini adalah **100%** namun terkait realisasi keuangan masih belum terealisasi **Rp.17.690.000,- (74,33%)**.

4. Reviu Laporan Keuangan Sebesar Rp. 43.179.000-

Kegiatan ini bertujuan agar laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 15.365.000,- (35,58%)**.

5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Sebesar Rp. 81.022.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan realisasi fisik sebesar **50%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 23.823.500- (29,40%)**.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu;

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Sebesar Rp. 49.982.200,-

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini masih **0%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sebesar Rp. 64.200.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya pemeriksaan dengan tujuan tertentu berjalan dengan baik. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai **50%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 11.600.000,- (18,07%)**.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 123.755.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar pendampingan dan asistensi dapat terlaksana dengan baik pada tiap OPD dalam menyusun SAKIP, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN, peningkatan kapabilitas AIP menuju level 3 serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah. Realisasi Fisik dari kegiatan ini **Daerah Sebesar 50%**. Realisasi keuangan dalam kegiatan ini mencapai **Rp. 18.510.000,-(14,96%)**.

2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sebesar Rp. 10.700.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini masih **0%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,- (0%)**.

3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Sebesar Rp. 109.207.600,-

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **50%** sedangkan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 6.005.775,-(5,50%)**.

4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 119.870.400

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **10%** sedangkan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis .

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Pemerintahannya. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan dalam isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan Kota Padang Panjang;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola menjadi peluang atau kekuatan organisasi;

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 1 (satu) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kuantitas, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.**

Jumlah personil auditor dan tenaga staf lainnya yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang jauh dari memadai, maka perlu dilakukan penambahan jumlah APIP.

2. *Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.*

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyadari dengan sepenuhnya bahwa tantangan dan permasalahan dibidang pengawasan semakin hari semakin kompleks, maka APIP yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang setiap saat perlu ditingkatnya kapasitas dan kualitasnya melalui diklat, studi komparatif, workshop, dan bimbingan teknis lainnya.

3. *Perubahan paradigma Pengawasan dari Watchdogs menjadi Mitra PERANGKAT DAERAH/unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.*

Tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai Perangkat Daerah pengawasan masih dianggap sebagai Perangkat Daerah yang suka mencari kesalahan Perangkat Daerah lainnya. Masih kurangnya pemahaman kebanyakan entitas pada Pemerintah Kota Padang Panjang tentang tugas APIP sebagai auditor intern harus menjadi perhatian serius bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merubah paradigma yang salah tersebut. Kedepan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus menjadi mitra kerja bagi Perangkat Daerah, bukan lagi sebagai hubungan subjek dan objek dalam hal pemeriksaan.

4. *Peningkatan Hubungan Kerja dengan BPK RI dan BPKP RI.*

Peningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI dan BPKP RI menjadi isu yang sangat startegis kedepan. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus meningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI sebagai auditor ekstern pemerintahan baik dalam hal pendampingan pemeriksaan maupun dalam hal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPKP RI sebagai lembaga yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada seluruh APIP, juga harus dilakukan peningkatan hubungan kerja terutama dalam hal peningkatan kapasitas APIP melalui diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP RI.

5. *Pemanfaatkan Komitmen Pimpinan dan APIP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka Good Goverment.*

Komitmen pimpinan dan APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangatlah perlu, karena tanpa komitmen yang tinggi dalam rangka penegakan aturan dari seluruh *stakeholder* yang ada, akan sangat sulit dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik/ *good goverment* tersebut.

6. *Koordinasi dan Konsolidasi dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan Aparat Penegak Hukum.*

Tidak bisa kita pungkiri bahwa Inspektorat Daerah secara nasional juga dituntut untuk berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Aparat Penegak Hukum di daerah dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yang menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Tahun 2024, Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan :

1. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai nilai Sangat Baik.
2. 95% Perangkat Daerah menyusun LKjIP secara benar dan tepat.
3. Renstra Perangkat Daerah yang sinkron dengan RPJMD 100%.
4. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi terlaksana 100 %.

Selain hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang juga diperintahkan untuk mengawal kebijakan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara lain pengawasan vaksinsasi dan monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Hal ini semakin menegaskan fungsi dan peran Inspektorat yang sangat *vital* dalam rangka mengawal kebijakan nasional maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merealisasikan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APiP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Nama Program	Indikator Program	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
							TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Kualitas Pengawasan			Indeks	2	3	4
		Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP			Level	3	3	3
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	%	88%	90%	95%
		Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat			%	96%	97%	98%
				Program Perumusan Kebijakan, Asistensi, dan Pendampingan	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP KPK-RI	%	91%	92%	93%
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP			Level	3	3	3
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	%	90%	93%	95%

Pada Tahun 2024 terdapat 2 (dua) target Indikator Kunci (IKK) yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkannya yaitu :

No	Indikator Kerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target Tahun 2024	Sumber Data
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	BPKP RI
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kematangan PK APIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	BPKP RI

Namun demikian, target IKK tersebut tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Inspektorat saja, namun perlu dukungan dari seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terutama terkait dengan capaian Maturitas SPIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c) Reviu Laporan Kinerja
 - d) Reviu Laporan Keuangan
 - e) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu., dengan sub kegiatan:
 - a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri 1 kegiatan yaitu :
1. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- b. Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan 2024

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH								5.482.565.960,00	7.006.773.433,00	6.984.735.071,00	1.502.169.111,00						8.149.000.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							5.482.565.960,00	7.006.773.433,00	6.984.735.071,00	1.502.169.111,00							8.149.000.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							5.482.565.960,00	7.006.773.433,00	6.984.735.071,00	1.502.169.111,00							8.149.000.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah				90 %	90 %	4.967.919.100,00	5.935.857.233,00	6.142.328.071,00	2.001.080.900,00							6.969.000.000,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang Dibayarkan Tepat Waktu				100 %	100 %	4.126.507.000,00	4.650.716.833,00	4.928.804.271,00	802.297.271,00			-	-	Perangkat Daerah		5.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.126.507.000,00	4.650.716.833,00	4.928.804.271,00	802.297.271,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai				100 %	100 %	68.332.800,00	279.589.800,00	340.700.000,00	272.367.200,00			-	-	Perangkat Daerah		370.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	14.500.000,00	16.000.000,00	15.500.000,00	1.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	53.832.800,00	263.589.800,00	325.200.000,00	271.367.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan				100 %	100 %	265.068.500,00	295.312.900,00	282.146.900,00	17.078.400,00			-	-	Perangkat Daerah		442.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.108.000,00	2.553.700,00	2.553.700,00	-554.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.094.000,00	2.053.000,00	-7.947.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.790.000,00	47.784.800,00	47.784.800,00	7.994.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.999.500,00	13.656.400,00	13.656.400,00	-11.343.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.996.000,00	0,00	0,00	-9.996.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	177.175.000,00	222.224.000,00	216.099.000,00	38.924.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan				100 %	100 %	55.000.000,00	91.790.500,00	91.110.500,00	36.110.500,00			-	-	Perangkat Daerah		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	91.790.500,00	91.110.500,00	36.110.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan				80 %	80 %	263.010.800,00	248.117.200,00	233.076.400,00	-29.934.400,00			-	-	Perangkat Daerah		307.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	520.000,00	1.019.200,00	-980.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.046.000,00	17.808.400,00	17.808.400,00	-7.237.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	235.964.800,00	229.788.800,00	214.248.800,00	-21.716.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan				100 %	100 %	190.000.000,00	370.330.000,00	266.490.000,00	76.490.000,00			-	-	Perangkat Daerah		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	95.000.000,00	221.750.000,00	214.294.000,00	119.294.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	32.020.000,00	30.180.000,00	180.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	800.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00	6.560.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	99.200.000,00	5.456.000,00	-44.544.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan				88 %	88 %	380.604.060,00	707.383.200,00	589.219.000,00	299.395.940,00							680.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan				70 %	70 %	335.327.760,00	593.201.000,00	525.019.000,00	189.691.240,00			-	-	Perangkat Daerah		580.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	50.050.000,00	39.600.000,00	30.250.000,00	-19.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				120 Laporan	120 Laporan	215.917.760,00	405.600.000,00	405.600.000,00	189.682.240,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	19.870.000,00	23.800.000,00	17.690.000,00	-2.180.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	43.179.000,00	15.365.000,00	365.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				0 Kesepakatan	0 Kesepakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				3 Dokumen	3 Dokumen	34.490.000,00	81.022.000,00	56.114.000,00	21.624.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan				100 %	100 %	45.276.300,00	114.182.200,00	64.200.000,00	18.923.700,00			-	-	Perangkat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	2.476.300,00	49.982.200,00	0,00	-2.476.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				6 Laporan	6 Laporan	42.800.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	21.400.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP				91 %	91 %	134.042.800,00	363.533.000,00	253.188.000,00	365.957.200,00							500.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan				50 %	50 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan				87 %	87 %	124.042.800,00	363.533.000,00	253.188.000,00	129.145.200,00			-	-	Perangkat Daerah		470.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	40.980.000,00	123.755.000,00	80.010.000,00	39.030.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	55.430.000,00	109.207.600,00	42.607.600,00	-12.822.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	16.932.800,00	119.870.400,00	119.870.400,00	102.937.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								5.482.565.960,00	7.006.773.433,00	6.984.735.071,00	1.502.169.111,00							8.149.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan. Dalam hal ini atekrait realisasi dan capaian pada triwulan II, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil target pelaksanaan program/ kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub kegiatan. Pedoman Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dijadikan peroman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang Panjang, September 2024

Inspektur,



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE.

Pembina Utama Muda NIP. 19700405 199703 1 004